

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Triwulan III 2025 (30 September 2025)

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615

Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514

e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode yang Triwulan III 2025 (30 September 2025)

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun & menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan & kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun & disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 30 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRU ENDO, S.H.I.

NIP.19710421 199603 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum.....	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere.....	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi.....	17
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	50
B.2. Belanja	50
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
C.1. Aset Lancar	51
C.2. Aset Tetap.....	52
C.3. Aset Lainnya	55
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	56
C.6. Ekuitas	57
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	58
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	58
D.2. Beban Pegawai	58
D.3. Beban Persediaan.....	59

D.4. Beban Barang dan Jasa	59
D.5. Beban Pemeliharaan	60
D.6. Beban Perjalanan Dinas	60
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	61
D.8. Beban Bantuan Sosial	61
D.9. Beban Penyusutan & Amortisasi	62
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	62
D.11. Beban Lain-lain	63
D.12. Kegiatan Nonoperasional	63
D.13. Pos Luar Biasa	63
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
E.1. Ekuitas Awal	64
E.2. Surplus (defisit) LO	64
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset	64
E.3. 2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	64
E.3. 3 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi	64
E.3. 4 Koreksi Lain-lain	64
E.4. Transaksi Antar Entitas	65
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	65
E.4. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	66
E.5. Ekuitas Akhir	66
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	66
F.2. Pengungkapan Lain-lain	66
Daftar dan Lampiran	68
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	69
Daftar Hibah Langsung	72

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan per Triwulan III (30 September 2025) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, & isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran & posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 30 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.H.I.
NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, & Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Triwulan III Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) & berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2025 s.d. 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 September 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,423,377 atau mencapai 77 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1,838,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 September 2025 adalah sebesar Rp2,149,940,012 atau mencapai 75 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp2,859,015,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per Triwulan III (30 September 2025).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp9,352,246,678 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp19,873,653; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp9,332,373,025; Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; & Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp156,915,333 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp156,915,333 & Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp9,195,331,345.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, & surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1,481,530 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2,412,236,066 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2,410,754,536). Kegiatan Non Operasional & Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp0 & surplus (defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar (Rp2,410,754,536).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp9,457,569,246 ditambah surplus (defisit)-LO sebesar (Rp2,410,754,536) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 & ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2,148,516,635 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai Rp9,195,331,345.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 September 2025, nilai Aset, Kewajiban, & Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2025 & 30 September 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2025		30 September 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,838,000	1,423,377	77	1,296,980
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,838,000	1,423,377	77	1,296,980
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1,796,959,000	1,357,588,012	75	1,200,307,918
2. Belanja Barang	B.2.2	1,067,056,000	792,352,000	75	723,877,991
3. Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara		2,859,015,000	2,149,940,012	75	1,924,185,909

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. *NERACA PERBANDINGAN*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NERACA
per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	19,800,000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	58,153	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1. 3.	58,153	0
Persediaan	C.1. 4.	15,500	0
Jumlah Aset Lancar		19,858,153	0
Aset Tetap C.2			
Tanah	C.2. 1.	4,045,410,000	4,045,410,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,970,178,446	2,979,528,443
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,229,115,000	6,229,115,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	25,401,979	25,401,979
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,937,732,400)	(3,820,858,316)
Jumlah Aset Tetap		9,332,373,025	9,458,597,106
Aset Lainnya C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	4,510,000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	271,739,247	262,389,250
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(276,249,247)	(266,899,250)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		9,352,246,678	9,458,597,106
KEWAJIBAN			

Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	128,326,833	1,027,860
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	8,788,500	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	19,800,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		156,915,333	1,027,860
Jumlah Kewajiban		156,915,333	1,027,860
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	9,195,331,345	9,457,569,246
Jumlah Ekuitas Dana		9,195,331,345	9,457,569,246
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9,352,246,678	9,458,597,106

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	30 September 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1,481,530	1,296,980
Jumlah Pendapatan		1,481,530	1,296,980
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,485,914,845	1,290,151,376
Beban Persediaan	D. 3	24,492,500	15,544,500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	376,621,140	360,386,991
Beban Pemeliharaan	D. 5	354,425,000	239,174,500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	44,558,500	121,634,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	126,224,081	128,490,186
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2,412,236,066	2,155,381,553
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2,410,754,536)	(2,154,084,573)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2,410,754,536)	(2,154,084,573)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pendapatan PNDP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2,410,754,536)	(2,154,084,573)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	30 September 2024
Ekuitas Awal	E. 1	9,457,569,246	9,674,989,904
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2,410,754,536)	(2,154,084,573)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2,418,516,635	1,922,947,082
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(262,237,901)	(231,137,491)
Ekuitas Akhir		9,195,331,345	9,443,852,413

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

"Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transpaaransi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan.

4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan & penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan & keprotokolan, humas, & keamanan.
9. Meningkatnya sarana & prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, & pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan & operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) & Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, & aset lainnya untuk penyusunan neraca & laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan & penyajian Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan & penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu & dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan & penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, & praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, & tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan & tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi & Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, & tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja & selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja & selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi & fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, & Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, & aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan & barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan & pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, & piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), & kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus & nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Uraenol, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Optaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek & kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, & Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp948,818

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebesar Rp1,423,377 atau mencapai 77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,838,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	1,838,000	1,423,377	77,44
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
	Total Pendapatan	1,838,000	1,423,377	77,44

Adanya pendapatan penggunaan sarana & prasarana sesuai dengan tugas & fungsi pada 30 September 2025 sebesar Rp1,423,377 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung, & bangunan.

Perbandingan realisasi PNBP 30 September 2025 & 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Perubahan Rp	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	1,423,377	1,295,980	128,397	14.23
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0
	Total Pendapatan	1,423,377	1,295,980	128,397	14.23

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 adalah sebesar Rp2,419,940,012 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 75% dari

Rp2,419,940,012

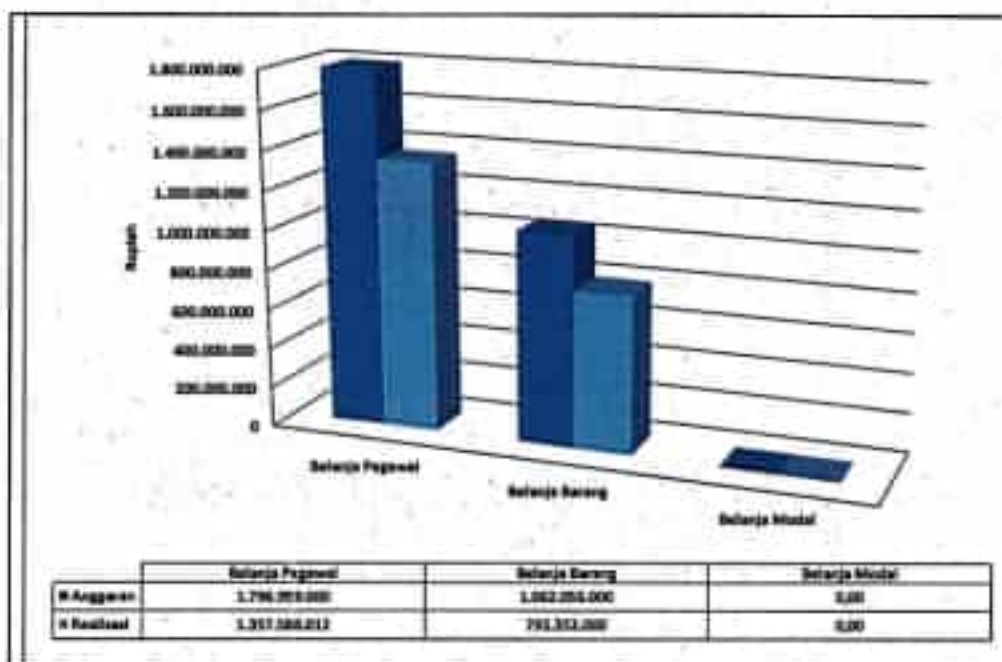
anggaran senilai Rp2,787,453,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,796,559,000	1,357,773,060	75.55
Belanja Barang	1,062,056,000	792,332,000	74.61
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	2,858,615,000	2,150,105,060	75.20
Pengembalian Belanja	0	185,048	0
Total Belanja Netto	2,858,615,000	2,149,919,012	75.20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruif (SAIRA) 2025 & 2024

Perbandingan realisasi belanja 30 September 2025 & 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Rak (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1,357,588,012	1,200,307,918	157,280,094	13.10

Belanja Barang	792,352,000	723,877,991	68,474,009	9.459
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	2,859,015,000	1,924,185,900	225,754,101	11.73

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai / Rp
1,337,588,012

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp1,357,588,012 & Rp1,200,307,918. Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 13.10 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	483,409,260	454,722,100	28,687,160	6.308
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,191	7,734	(1,543)	(19.95)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	31,578,540	31,822,060	(43,520)	(0.138)
Belanja Tunj. Anak PNS	9,602,884	8,187,494	1,415,390	17.29
Belanja Tunj. Struktural PNS	15,250,000	16,720,000	(1,470,000)	(8.782)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	24,555,000	495,810,000	(471,335,000)	(95.05)
Belanja Tunj. PPh PNS	2,638,690	76,007,832	(73,371,142)	(96.53)
Belanja Tunj. Beras PNS	25,274,580	22,957,140	2,317,440	10.09
Belanja Uang Makan PNS	61,923,000	53,154,000	8,769,000	16.50
Belanja Tunjangan Umum PNS	2,385,000	4,755,000	(2,370,000)	(49.84)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	37,800,000	36,450,000	1,350,000	3.704
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	90,534,613	0	90,534,613	100
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	560,300,000	0	560,300,000	100
Total Belanja Bruto	1,357,773,050	1,200,493,360	157,279,700	13.10
Pengembalian Belanja	185,048	185,442	(394)	(0.212)
Total Belanja Netto	1,337,588,012	1,200,307,918	137,280,094	11.40

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp792,352,000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp792,352,000 & Rp723,877,991.

Realisasi Belanja Barang 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 9.459 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peningkatan Belanja Barang Operasional;
2. Peningkatan Belanja Barang Nonoperasional;
3. Peningkatan Belanja Persediaan;
4. Peningkatan Belanja Jasa; dan
5. Peningkatan Belanja Pemeliharaan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Pertbandingan Belanja Barang per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Perubahan (Naik/ Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	353,889,000	325,782,491	27,906,509	8.568
Belanja Barang Nonoperasional	700,000	0	700,000	100
Belanja Persediaan	30,889,000	23,780,000	7,089,000	29.81
Belanja Jasa	23,050,000	21,742,500	1,307,500	6.013
Belanja Pemeliharaan	339,485,500	230,939,000	108,546,500	47
Belanja Perjalanan Dinas	44,558,500	121,634,000	(77,075,500)	(63.37)
Total Belanja Brutto	792,352,000	723,877,991	68,474,009	9.459
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	792,352,000	723,877,991	68,474,009	9.459

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Realisasi Belanja Modal 30 September 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 30 September 2024.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Pertbandingan Belanja Modal per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0

Total Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp 19,873,653

Nilai Aset Lancar per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19,873,653 & Rp0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	0
Piutang Bukan Pajak	58,153	0
Persediaan	15,500	0
Total Aset Lancar	19,873,653	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp19,800,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19,800,000 & Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, & di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	0
	Jumlah	19,800,000	0

Piutang Bukan
Pajak:
Rp58,153

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp58,153 & Rp0.

Piutang Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Piutang Bukan Pajak	58,153	0
	Jumlah	58,153	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp15,500 & Rp0.

Persediaan pada Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Rincian Persediaan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Persediaan	15,500	0
	Jumlah	15,500	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp9,332,373,025

Nilai Aset Tetap per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp9,332,373,025 & Rp9,458,597,106. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024	Perubahan (Naik/Turun)
1	Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,970,178,446	2,979,528,443	(9,349,997)
3	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979	0

Jumlah	13.270.105,425	13.279.455,422	(9.349,937)
Akumulasi Penyusutan	(3.937.732,400)	(3.820.858,316)	(116.874,084)
Jumlah Aset Tetap	9.332.373,025	9.458.597,106	(126.224,081)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
4,045,410,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,045,410,000 & Rp4,045,410,000. Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	272	Hak Pakai Nomor 600	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		253,876,000
2	3	750	Hak Pakai Nomor 310	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		691,754,000
3	4	3,840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		3,102,788,000
Jumlah						4,045,410,000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
2,972,048,443

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,970,178,446 & Rp2,979,528,443.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Peralatan dan Mesin	2,970,178,446	2,979,528,443
	Jumlah	2,970,178,446	2,979,528,443

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp
6,229,115,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6,229,115,000 & Rp6,229,115,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000
	Jumlah	6,229,115,000	6,229,115,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp
25,401,979

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, serta jalan, irigasi, & jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp25,401,979 & Rp25,401,979.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979
	Jumlah	25,401,979	25,401,979

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp(3,937,732,
400)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(3,937,732,400) & Rp(3,820,858,316).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas & manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah & Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 September 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	4,045,410,000	(0)	4,045,410,000
2	Peralatan & Mesin	2,570,178,446	(2,805,171,245)	165,007,201
3	Gedung & Bangunan	6,229,115,000	(1,132,561,155)	5,096,553,845

4	Jalan, Irigasi, & Jaringan	0	(0)	0
5	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	(0)	25,401,979
Jumlah		13,270,105,425	(1,937,732,400)	9,132,373,025

Aset Lainnya:
Rp0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya Per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
2	Aset lain-lain	271,739,247	262,389,250
Nilai perolehan Aset Lainnya		276,249,247	266,899,250
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset lainnya		(276,249,247)	(266,899,250)
Nilai buku Aset Lainnya		0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp4,510,000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,510,000 & Rp4,510,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian Aset tak berwujud per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
Aset Tak Berwujud		4,510,000	4,510,000
Jumlah		4,510,000	4,510,000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2025.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset lain-lain :
Rp271,739,247

Saldo aset lain-lain per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp271,739,247 & Rp262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 September 2025	271,739,247
Mutasi Tambah	9,349,997
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	262,389,250

Asset lain-lain merupakan barang milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp156,915,333

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp156,915,333 & Rp1,027,860. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 30 September 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
1	Utang kepada Pihak Ketiga	128,326,833	1,027,860
2	Utang yang Belum Ditagihkan	8,788,500	0
3	Uang Muka dari KPRH	19,800,000	0
	Jumlah	156,915,333	1,027,860

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp128,326,833

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp128,326,833 & Rp1,027,860. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar & merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Utang kepada Pihak Ketiga	128,326,833	1,027,860
	Jumlah	128,326,833	1,027,860

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang
Belum
Ditagihkan:
Rp8,788,500

Jumlah utang yang belum ditagihkan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8,788,500 & Rp0.

Adapun rincian utang yang belum ditagihkan Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Utang yang Belum Ditagihkan	8,788,500	0
	Jumlah	8,788,500	0

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp19,800,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19,800,000 & Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 September 2025 & 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
	Uang Muka dari KPPN	19,800,000	0
	Jumlah	19,800,000	0

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp9,195,331,345

Ekuitas per 30 September 2025 & 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,195,331,345 & Rp9,457,569,246. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 September 2025 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar (Rp262,237,901) atau sebesar (2.772) persen dari nilai per TA 2024. Jumlah nilai Kewajiban & Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp9,352,246,678, sedangkan per TA 2024 tercatat sebesar Rp9,458,597,106.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB: Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp1,481,530 & Rp1,296,980. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	1,838,000	1,481,530	80.60
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		1,838,000	1,481,530	80.60

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1,485,914,845 Jumlah Beban Pegawai per 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,485,914,845 & Rp1,290,151,376. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), & pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Nak (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	529,233,400	497,890,400	31,343,000	6.295
Beban Pembulatan Gaji PNS	6,834	7,223	(389)	(5.385)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	34,563,670	34,677,650	(13,980)	(0.040)
Beban Tunj. Anak PNS	10,543,436	9,061,934	1,581,502	17.45
Beban Tunj. Struktural PNS	18,770,000	18,240,000	(1,470,000)	(8.060)
Beban Tunj. Fungsional PNS	28,460,000	527,800,000	(501,340,000)	(94.99)
Beban Tunj. PPh PNS	2,638,880	78,888,451	(76,231,761)	(96.66)
Beban Tunj. Iuran PNS	27,809,280	25,202,160	2,607,120	10.34

Beban Uang Makan PNS	61,923,000	53,154,000	8,769,000	16.50
Beban Tunjangan Umum PNS	2,935,000	4,935,000	(2,000,000)	(40.53)
Beban Tunjangan Kemahatan Hakim	41,850,000	40,500,000	1,350,000	3.233
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	96,633,979	0	96,633,979	100
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	609,500,000	0	609,500,000	100
Beban Gaji Pokok PPPK	20,092,000	0	20,092,000	100
Beban Pembulatan Gaji	624	0	624	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,506,900	0	1,506,900	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	401,840	0	401,840	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,593,240	0	1,593,240	100
Beban Tunjangan Umum PPPK	1,440,000	0	1,440,000	100
Total Beban Bruto	1,486,095,893	1,290,151,376	195,948,517	15.19
Pengembalian Beban	(185,048)	(185,442)	394	(0.212)
Total Beban Netto	1,485,914,845	1,290,151,376	195,763,469	15.17

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp24,492,500

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24,492,500 & Rp15,544,500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Perk. (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	24,492,500	15,544,500	8,948,000	64.73
Beban Persediaan Pita Cikal, Material, & Logor	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	24,492,500	15,544,500	8,948,000	64.73

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
Jasa :
Rp376,621,140

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp376,621,140 & Rp360,386,991. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	325,063,500	303,697,991	21,365,509	7.035
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,875,000	663,500	1,211,500	182.6
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,950,000	32,288,000	(5,328,000)	(16.50)
Beban Operasional Lainnya	0	1,033,000	(1,033,000)	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	100
Beban Sewa	13,757,000	11,468,500	1,268,500	10.16
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,265,140	8,218,000	49,140	0.598
Total Beban Barang dan Jasa	376,621,140	360,158,991	16,234,149	4.503

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp354,425,000

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp354,425,000 & Rp239,174,500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159,579,000	125,771,500	33,807,500	26.88
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,412,500	69,124,000	11,288,500	16.33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	107,887,000	36,043,500	71,843,500	199.3
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	6,546,500	8,215,500	(1,669,000)	(20.31)
Total Beban Pemeliharaan	354,425,000	239,174,500	115,250,500	48.19

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp44,538,500

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp44,558,500 & Rp121,634,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Real (Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas	44,558,500	121,834,000	(77,275,500)	(63,37)
Total Beban Perjalanan Dinas	44,558,500	121,834,000	(77,275,500)	(63,37)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Real (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Real (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0

Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan & Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
:
Rp126,224,081

Jumlah Beban Penyusutan & Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126,224,081 & Rp128,490,186. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,720,004	52,986,109	(2,266,105)	(4.277)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75,504,077	75,504,077	0	0
Jumlah Penyusutan	126,224,081	128,490,186	(2,266,105)	(1.764)
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	126,224,081	128,490,186	(2,266,105)	(1.764)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 30 September 2025 & 30 September 2024 (dalam satuan Rupiah)				
Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Nonoperasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional per 30 September 2025 & 30 September 2024 (dalam satuan Rupiah)				
Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan & beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 September 2025 & 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	Nilai (Tunai)	%
Pendapatan PHBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,457,569,246 & Rp9,674,989,904.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp(2,410,754,536) & Rp(2,154,084,573). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, & pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah sebesar Rp0 & Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang

terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, & utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September 2025 (dalam satuan Rupiah)	
Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,148,516,635 & Rp1,922,947,082.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 September 2025 (dalam satuan Rupiah)	
Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1,423,377)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,149,940,012
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Penghasilan Hibah Langsung	0
Penghasilan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	2,148,516,635

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2025, DDEL sebesar Rp(1,423,377), sedangkan DKEL sebesar Rp2,149,940,012.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas. Pada Periode hingga 30 September 2025, Transfer Masuk & Transfer Keluar sebesar Rp0 & Rp0.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 & 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,195,331,345 & Rp9,443,852,413.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan S-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Pembuat Komitmen : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Penandatangan/penguji SPM : Abdullah Muhammad, S.M.

Bendahara : Andi Abellia Reza, A.Md.

DAFTAR & LAMPIRAN

*A. INFORMASI KEUANGAN
TERTENTU (RINCIAN NILAI
PEROLEHAN, AKUMULASI
PENYUSUTAN, & NILAI BUKU ASET
TETAP)*

Pengadilan Agama Maumere
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, & Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2025

Lampiran 1. Neraca Pemerintah pada 30 September 2025							
No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
			Saldo Awal	Beban Penyusutan	Total	Per 30 September 2025	
A.	Tanah	4.862	4.045.410.000	0	0	0	4.045.410.000
1.	Tanah Persil	4.862	4.045.410.000	0	0	0	4.045.410.000
B.	Peralatan dan Mesin	428	2.907.123.096	(2.774.789.211)	(42.380.222)	(2.817.169.435)	169.953.661
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	390.018.828	(390.018.828)	0	(390.018.828)	0
2.	Alat Kantor	80	284.789.000	(284.789.000)	0	(284.789.000)	0
3.	Alat Rumah Tangga	229	1.144.553.948	(1.123.651.481)	3.600.621	(1.122.050.860)	22.503.108
4.	Alat Studio	9	67.817.820	(40.976.910)	(9.386.182)	(46.345.092)	21.472.728
5.	Alat Komunikasi	17	13.842.200	(13.842.200)	0	(13.842.200)	0
6.	Peralatan Pemancar	3	152.850.000	(100.699.998)	(7.150.001)	(107.850.000)	45.000.000
7.	Komputer Unit	51	686.335.910	(605.884.175)	(25.296.410)	(632.180.585)	54.155.325
8.	Peralatan Komputer	23	244.913.350	(210.926.640)	(7.188.250)	(218.092.890)	26.822.500
C.	Gedung dan Bangunan	6	6.229.115.000	(1.057.057.078)	(75.504.077)	(1.132.561.155)	5.096.553.845
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	4.048.852.000	(880.646.408)	193.602.893	(667.043.515)	3.379.788.485
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	1.745.180.000	(129.421.768)	(264.323.477)	(393.745.245)	1.351.434.755
3.	Tugu/Tanda Batas	2	437.083.000	(66.968.902)	(4.783.493)	(71.752.395)	365.330.605
D.	Aset Tetap Lainnya	465	25.401.979	0	0	0	25.401.979
1.	Barang Perpustakaan Tertata	463	25.201.979	0	0	0	25.201.979
2.	Kartografi, Hekah dan Lukisan	2	200.000	0	0	0	200.000
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	193	275.300.165	(265.950.168)	(9.349.997)	(275.300.165)	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	5.118.000	(5.118.000)	0	(5.118.000)	0
2.	Alat Ukur	1	50.000	(50.000)	0	(50.000)	0

3.	Alat Kantor	37	29,823,000	(29,823,000)	0	(29,823,000)	0
4.	Alat Rumah Tangga	108	67,457,248	(58,457,250)	(8,999,998)	(67,457,248)	0
5.	Alat Studio	2	20,800,000	(20,800,000)	0	(20,800,000)	0
6.	Alat Komunikasi	11	21,367,000	(21,367,000)	0	(21,367,000)	0
7.	Peralatan Pemancar	4	5,284,999	(4,935,000)	(349,999)	(5,284,999)	0
8.	Komputer Unit	9	71,700,000	(71,700,000)	0	(71,700,000)	0
9.	Peralatan Komputer	19	53,249,918	(53,249,918)	0	(53,249,918)	0
10.	Peralatan Olah Raga	1	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
Jumlah		5,954	18,962,350,240	(4,097,796,459)	(127,234,296)	(4,225,030,755)	9,337,319,485

B. INFORMASI PENTING LAINNYA (DAFTAR HIBAH LANGSUNG)

untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2025

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
					Ya	Tidak
			Jumlah :			

*C. LAPORAN REALISASI
ANGGARAN, NERACA,
LAPORAN OPERASIONAL, &
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS SAKTI*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MAUMERE 402851

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM
Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,838,000	1,423,377	(414,623)	77.44	2,055,000	1,238,827	(816,173)	60.28
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Ketayasan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,838,000	1,423,377	(414,623)	77.44	2,055,000	1,238,827	(816,173)	60.28
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,838,000	1,423,377	(414,623)	77.44	2,055,000	1,238,827	(816,173)	60.28
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,859,015,000	2,149,940,012	(709,074,988)	75.20	2,719,273,000	1,924,185,909	(795,087,091)	70.76
1. Belanja Pegawai	1,796,959,000	1,357,568,012	(439,370,988)	75.55	1,611,758,000	1,200,307,918	(411,450,082)	74.47
2. Belanja Barang	1,062,056,000	792,352,000	(269,704,000)	74.61	1,107,515,000	723,877,991	(383,637,009)	65.36
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MAUMERE 402051

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM
Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.J + B.II)	2,859,015,000	2,149,940,812	(709,074,988)	75.20	2,719,273,000	1,824,185,908	(795,087,091)	70.76
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Maumere, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sesungguhnya



JUFRI ENDO, S.H.I.

NIP 197104211996031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (402651) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM
 Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	0	19,800,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	58,153	0	58,153	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	58,153	0	58,153	0.00
Persediaan	15,500	0	15,500	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	19,873,653	0	19,873,653	
ASET TETAP				
Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,970,178,446	2,979,528,443	(9,349,997)	(0.31)
Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,937,732,400)	(3,820,858,316)	(116,874,084)	3.06
JUMLAH ASET TETAP	9,332,373,025	9,438,597,106	(106,224,081)	(1.33)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,510,000	4,510,000	0	0.00
Aset Lain-lain	271,739,247	262,369,250	9,349,997	3.58
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(276,249,247)	(268,899,250)	(9,349,997)	3.50
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	9,352,346,678	9,438,597,106	(106,350,428)	(1.12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	128,326,833	1,027,860	127,298,973	12,384.86
Utang Yang Belum Dibagikan	8,788,500	0	8,788,500	0.00
Utang Muka dari KPPN	19,800,000	0	19,800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	156,915,333	1,027,860	155,887,473	15,168.22
JUMLAH KEWAJIBAN	156,915,333	1,027,860	155,887,473	15,168.22
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,195,331,345	9,457,569,246	(262,237,901)	(2.77)
JUMLAH EKUITAS	9,195,331,345	9,457,569,246	(262,237,901)	(2.77)
JUMLAH EKUITAS	9,195,331,345	9,457,569,246	(262,237,901)	(2.77)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,352,346,678	9,438,597,106	(106,350,428)	(1.12)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (402851) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM

Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM

Halaman : 2

lap_noraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Maumere, 20 Oktober 2025

Penasihat Hukum Jawab UAKPA

Sekretaris

JUFRI ENDO, S.H.I.

NIP.197104211996031002



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (402851) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM

Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,481,530	1,296,980	184,550	14.229
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,481,530	1,296,980	184,550	14.229
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,481,530	1,296,980	184,550	14.229
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,485,914,845	1,290,151,376	195,763,469	15.174
Beban Persediaan	24,492,500	15,544,500	8,948,000	57.564
Beban Barang dan Jasa	376,621,140	360,386,991	16,234,149	4.506
Beban Pemeliharaan	354,425,000	239,174,500	115,250,500	48.187
Beban Perjalanan Dinas	44,558,500	121,634,000	(77,075,500)	(63.367)
Beban Barang Untuk Diarahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (402851) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Tgl Data : 21/10/25 1:52 PM

Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	126,224,061	128,490,186	(2,266,105)	(1.764)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,412,236,066	2,155,381,553	256,854,513	11.917
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,410,754,536)	(2,154,064,573)	(256,689,963)	11.916
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,410,754,536)	(2,154,064,573)	(256,689,963)	11.916
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,410,754,536)	(2,154,064,573)	(256,689,963)	11.916

Keterangan :

FINAL

Maumere, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sebelum



JUFRU ENDO, S.H.I

NIP 197104211990031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (402051) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Tgl Data : 21/10/25 12:30 PM

Tgl Cetak : 21/10/25 3:17 PM

Halaman : 1

lap_ipe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,457,569,246	9,674,989,904	(217,420,658)	(2.25)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,410,754,536)	(2,154,064,573)	(256,689,963)	11.92
KOREKSI YANG MENAMBAHMENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,148,516,635	1,922,947,062	225,569,573	11.73
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(262,237,901)	(231,137,491)	(31,100,410)	13.46
EKUITAS AKHIR	9,195,331,345	9,443,852,413	(248,521,068)	(2.63)

Keterangan :

FINAL

Maumere, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



JUFFRI ENDO, S.H.I.

NIP 197104211996031002